



# Jurnal Penelitian

# POLITIK

Vol.15, No.2, Desember 2018

## KONSTELASI POLITIK DI TAHUN ELEKTORAL

- Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018
- Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal
- Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017
- Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018)
- Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019
- Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi
- Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia
- *Marketing* Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018

### RESUME PENELITIAN

- Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung
- Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

### REVIEW BUKU

- Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 15	No. 2	Hlm. 129-320	Jakarta, Desember 2018	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)  
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)  
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)  
Ratna Shofi Inayati, MBA (*ASEAN dan politik luar negeri*)

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI  
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

**Dewan Redaksi**

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)  
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

**Redaksi Pelaksana**

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)  
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

**Sekretaris Redaksi**

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si  
Yusuf Maulana, SAP

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom  
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com  
*Website*: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

**ISSN**

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• <b>Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018</b> Moch. Nurhasim	129–142
• <b>Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal</b> Lili Romli	143–160
• <b>Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017</b> Agus Sutisna dan Idil Akbar	161–178
• <b>Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018)</b> Firman Noor	179–196
• <b>Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019</b> Ridho Imawan Hanafi	197–213
• <b>Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi</b> Sri Budi Eko Wardani	215–231
• <b>Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia</b> Sri Yanuarti	233–248
• <b>Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018</b> M. Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri	249–265
Resume Penelitian	
• <b>Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung</b> Kurniawati Hastuti Dewi, dkk	267–288
• <b>Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi</b> Aisah Putri Budiatri, dkk	289–306
Review Buku	
• <b>Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik</b> Mouliza K.D Sweinstani	307–317
Tentang Penulis	319–320
Pedoman Penulisan	321–325

## CATATAN REDAKSI

Konstelasi politik menjelang tahun elektoral menjadikan dinamika politik baik di tingkat nasional maupun lokal menarik untuk dikaji.

*Jurnal Penelitian Politik* nomor ini menyajikan 8 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama berjudul “Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018” yang ditulis oleh Moch. Nurhasim. Artikel ini membahas tentang Pilkada serentak 2018 yang menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya dan bahkan menjadi pola yang berulang. Koalisi nano-nano adalah sebuah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religius dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. Campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau linear antara pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra-koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Artikel kedua ditulis oleh Lili Romli, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, memperlihatkan tentang fenomena munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Para calon tunggal tersebut sebagian besar menang dalam pemilihan kepala daerah, hanya calon tunggal di Kota Makassar yang mengalami kekalahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang semakin berat, dan “mahar politik” yang semakin mahal. Kemenangan para calon tunggal dalam pilkada tersebut bisa menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme check and balances tidak berjalan.

Artikel berikutnya ditulis oleh Agus Sutisna dan Idil Akbar berjudul “Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017” membahas mengenai kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta telah melahirkan dampak elektoral terhadap Pilgub Banten 2017 berupa terjadinya perubahan preferensi politik warga Banten. Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief yang diusung oleh koalisi PDIP, Nasdem dan PPP, yang semula mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap merepresentasikan semangat perubahan untuk keluar dari jeratan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah yang korup, secara perlahan mengalami degradasi dukungan seiring dengan pemberitaan negatif seputar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang secara terus menerus mengalami perluasan dan penajaman hingga memasuki masa tenang Pilkada.

Artikel keempat yakni “Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018” ditulis oleh Firman Noor. Artikel ini membahas beberapa fenomena yang mengindikasikan adanya kondisi negatif dari eksistensi partai politik terkait dengan pilkada. Fenomena ini adalah tidak hadirnya sosok kepala daerah yang merupakan pimpinan partai di daerah itu, masih kuatnya peran jaringan non-partai dalam kontestasi politik, hingga dominasi pragmatisme dalam menentukan koalisi yang kerap menyingkirkan idealisme atau ideologi partai yang secara keseluruhannya memperlihatkan kerentanan partai di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan hal-hal yang menyebabkan itu semua. Selain itu tulisan ini menawarkan beberapa solusi agar berbagai kelemahan itu dapat teratasi dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas pilkada di kemudian hari.

Artikel selanjutnya membahas tentang “Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019” yang ditulis oleh Ridho Imawan Hanafi. Artikel ini membahas mengenai kemunculan dan tantangan partai politik baru pada Pemilu 2019 dengan menelaah ideologi-program, basis dukungan, dan kepemimpinan. Partai baru muncul sebagai alternatif pilihan politik yang berbeda dari partai lama yang sudah ada. Partai politik baru ini bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan kebaruan dalam kepartaian. Partai-partai baru membawa corak nasionalis dengan kecenderungan program yang tidak jauh berbeda dari partai baru lain. Antara satu partai dan lainnya basis dukungan masih cair dan bisa saling memperebutkan pasar pemilih.

Sementara itu, artikel “Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi” yang ditulis oleh Sri Budi Eko Wardani yang membahas mengenai Sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan sejak Pemilu 2009 membawa perubahan dramatis pada hubungan representasi politik pasca-Orde Baru. Terjadi perubahan dalam persepsi wakil terhadap konstituen dari sekadar formalitas menjadi politis untuk kepentingan pemilu berikutnya. Persepsi terhadap konstituen memengaruhi tindakan wakil di daerah pemilihan. Tulisan ini fokus pada persepsi wakil terhadap konstituen di tingkat lokal era reformasi, dengan studi kasus Anggota DPRD Banten 2014-2019, serta menggunakan teori lingkaran konsentrik konstituensi dari Richard Fenno, dan teori representasi yang merujuk pada Hanna Pitkin.

Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti berjudul “Militer dan Pemilu-pemilu di Indonesia” membahas mengenai keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim kemenangan para kasus kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkarier di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisa, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka

dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik.

Artikel terakhir yakni ditulis oleh Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri berjudul “Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018” membahas mengenai isu agama yang menjadi salah satu instrumen strategis dalam kontestasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai bagian dalam pembentukan perilaku memilih, sentimen dan isu agama muncul dan digunakan di 7 pilkada sepanjang 2015-2018.

Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2017. Naskah pertama ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi, “Modal, Strategi Dan Jaringan Perempuan Politisi Dalam Kandidasi Pilkada Langsung”. Tulisan ini menyoroti bagaimana pentingnya tahap kandidasi melalui jalur partai politik, sebagai pintu masuk yang harus dapat ditembus oleh politisi perempuan untuk maju dalam Pilkada langsung. Melalui analisis mendalam terhadap dua perempuan politisi di Grobogan dan Lampung Timur, buku ini menggarisbawahi pentingnya tiga hal yaitu modal berupa modal individu dan modal sosial, strategi, dan jaringan yang harus dimiliki dan mampu dimainkan oleh perempuan politisi untuk dapat dicalonkan dalam Pilkada langsung.

Naskah kedua, “Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi”, ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Tulisan ini membahas mayoritas partai politik di Indonesia pada era reformasi yang telah terjebak pada persoalan personalisasi politik. Individu elite partai menjadi image partai sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai dalam jangka waktu yang lama. Padahal, partai politik telah memiliki mekanisme suksesi, namun satu sosok elite tetap mampu mempersonalkan partainya. Penelitian ini melihat ada beberapa aspek yang menjadi

penyebabnya, termasuk sejarah pendirian partai, kepemimpinan karismatik dan pendanaan partai. Di luar itu, presidensialisme, sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi faktor yang turut memfasilitasi munculnya personalisasi partai. Personalisasi partai ini harus dihindari karena dalam jangka panjang akan berdampak negatif tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga pada upaya penegakan demokrasi di Indonesia.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Danny Hayes & Jennifer L. Lawless, “Mitos Dan Realita Perempuan Dalam Pemilu: Pelajaran Dari Situasi Politik Amerika Di Era Polarisasi Politik”. *Review* yang ditulis Mouliza K.D Sweinstani menelaah respon dari situasi politik Amerika yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam kehidupan politik Amerika Serikat khususnya dalam dua pemilu sela pada tahun 2010 dan 2014. Buku ini juga memberikan cara pandang baru terhadap area politik di era terpolarisasi di Amerika Serikat dengan berusaha membongkar pemahaman konvensional mengenai bias yang harus dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik. Selain itu buku ini juga berusaha mencari tahu apa sebetulnya yang menjadi penyebab masih adanya pemahaman bias gender dalam area politik di Amerika Serikat. Hanya saja, simpulan dari buku ini perlu digunakan secara hati-hati agar pembaca tidak melakukan generalisasi atas kondisi politik yang telah dianggap netral gender dan tidak diskriminatif seperti yang terjadi di Amerika. Pembaca

sebaiknya mengontekskan kondisi lanskap politik masing-masing agar dapat menghasilkan temuan yang mengelaborasi temuan Hayes dan Lawless. Dengan demikian, hal ini dapat memperkaya studi-studi tentang kampanye politik, media dan kandidat perempuan dalam kajian ilmu politik.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai isu politik di tahun elektoral. Selamat membaca.

Redaksi

# MILITER DAN PEMILU-PEMILU DI INDONESIA

## *MILITARY AND ELECTIONS IN INDONESIA*

**Sri Yanuarti**

Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Email: yanuc2000@yahoo.com

Diterima: 2 Oktober 2018; Direvisi: 18 Oktober 2018; Disetujui: 30 Desember 2018

### ***Abstract***

*In the past ten years there has been enthusiasm among the military involved in political contestation. This can be seen from the involvement of a number of active and retired officers becoming candidates for regional heads both at the district / city, provincial and presidential elections or simply becoming supporting team to win the presidential candidates. The number of those who try their luck in political career. This paper tries to analyze how the Indonesia military shifting their career to political sphere during the democratic period, especially in Indonesian elections, what strategy is played by the military to support its political interests, how the role will affect the consolidation and political professionalism.*

**Keywords:** *elections, military, new order, post Suharto*

### **Abstrak**

Dalam sepuluh tahun terakhir terjadi antusiasme di kalangan militer terlibat dalam politik kontestasi politik. Hal ini terlihat dari keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim pemenangan para kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkarier di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisis, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik.

**Kata Kunci:** pemilu, militer, Orde Baru, pascaSoeharto

### **Pendahuluan**

Pada lima tahun terakhir, kita disugahi dengan fenomena maraknya kandidat yang berlatar belakang TNI terlibat dalam pemilihan bupati, gubernur maupun presiden. Pada tahun 2015 misalnya sekurang-kurangnya terdapat lima calon kepala daerah yang berasal dari kalangan TNI baik yang sudah purnawirawan maupun yang masih aktif. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah tersebut bertambah menjadi sembilan orang.

Keriuhan keterlibatan “kembali” dalam kandidat yang memiliki latar belakang militer mendapatkan penegasan manakala Agus Harimurti Yudhoyono, yang merupakan perwira muda dengan prestasi cemerlang memilih ikut dalam proses pemilihan gubernur DKI Jakarta. Meskipun hal tersebut menurut beberapa kalangan masyarakat sebagai hal yang tidak mengejutkan jika dikaitkan dengan posisi ayahnya—Susilo Bambang Yudhoyono, pendiri

dan penasehat partai demokrat sekaligus mantan presiden Indonesia.

Keterlibatan militer dalam pemilu-pemilu di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru. Pada masa Orba, militer bahkan menjadi salah satu pilar penopang kemenangan partai Golkar dalam pemilu-pemilu yang dilakukan pada masa itu. Sedangkan pada masa Orde Lama, militer justru membangun pengaruh politiknya dalam perlu untuk kepentingan kelompoknya dan seringkali pilihan politik yang dilakukan militer pada masa Orde Lama berseberangan dengan pilihan politik presiden maupun elite-elite politik lainnya.

Tindakan intervensi kelompok sipil pada persoalan-persoalan internal militer pada masa Kabinet Demokrasi Terpimpin, misalnya memunculkan peristiwa 17 Oktober 1952, di mana sejumlah elite TNI AD mengarahkan moncong meriam ke istana negara untuk memaksa presiden saat itu—Soekarno untuk membubarkan konstituante karena dipandang terlalu banyak mencampuri urusan internal militer. Tindakan militer tersebut oleh sebagian kalangan menunjukkan bahwa bagaimanapun militer merupakan kelompok kepentingan institusional yang tidak bisa diabaikan dalam percaturan politik Indonesia.<sup>1</sup>

Saat Sukarno pelan-pelan “dipereteli” kekuasaannya pasca-1965, dan Soeharto naik sebagai presiden pada 1967, tren para perwira militer memegang jabatan kepala daerah berlanjut dan semakin meluas. Beberapa di antaranya ada yang jadi gubernur hingga 10 tahun, selain jadi wali kota, bupati, atau Ketua DPRD.

Sebelum Soeharto berkuasa, hanya ada satu bupati dari golongan militer di Ketapang, Kalimantan Barat, yakni Hercan Yamani. Pada 1968, lima dari tujuh bupati adalah mantan perwira militer. Masih di pulau yang sama, wali kota Balikpapan, bahkan dari 1963 hingga 2001, berasal dari kalangan militer/polisi.

Letjen Marinir Ali Sadikin yang menjadi gubernur Jakarta hingga tahun 1977 pun digantikan oleh orang-orang dari kalangan Angkatan darat. Ada Tjokropranolo, R. Soeprapto, Wiyogo Atmodarminto, Soerjadi Soedirdja,

hingga Sutiyoso. DKI Jakarta baru dipimpin oleh sipil pada saat dipegang oleh Fauzi Bowo, yang berkarier sebagai birokrat, pada 2007. Tren warga sipil memimpin Jakarta berlanjut hingga gubernur sekarang yakni Anies Baswedan.

Contoh lainnya yakni Gubernur Sulawesi Selatan yang berkuasa dari tahun 1960 hingga 1966 adalah Kolonel Andi Ahmad Rivai. Setelahnya digantikan oleh Ahmad Lamo dari tahun 1966 hingga 1978. Pola pergantian kepala daerah selanjutnya, para gubernur setelah Ahmad Lamo kemudian diisi oleh kalangan berlatar belakang militer. Hanya satu orang sipil, yakni Ahmad Amirudin (mantan rektor Universitas Hasanuddin) yang pernah menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Begitupun Sumatera Utara, setelah seorang loyalis Soekarno, Brigadir Ulung Sitepu berhenti dari jabatannya, hanya P.R. Telaumbanua dari kalangan sipil yang berkantor di gubernuran dari 1965 hingga 1967. Selebihnya semasa Orde Baru, Sumatera Utara dipimpin oleh gubernur dari kalangan militer. Di Sumatera Selatan, setelah Ali Amin menjadi gubernur dari tahun 1966 hingga 1967, kepemimpinan berikutnya dipegang oleh deretan nama jenderal antara lain; Brigjen Asnawi Mangku Alam (1967-1978), Brigjen Sainan Sagiman (1978-1988), dan Brigjen Ramli Hasan Basri (1988-1998).

Sejak tahun 1966, Jawa Tengah dipimpin oleh gubernur militer, yakni Mayjen Moenadi, yang menjabat hingga tahun 1974. Estafet gubernur dari kalangan tentara pun berlanjut selepas itu tak terkecuali di Jawa Barat. Mashudi, Solihin Gautama Putra, Aang Kunaefi, Yogie Suardi Memet, dan Nana Nuriana merupakan jenderal-jenderal yang menjabat gubernur di Jawa Barat dan mayoritas mereka berasal dari Angkatan Darat. Biasanya jenderal-jenderal tersebut pernah menduduki Panglima Komando Daerah Militer di provinsi tersebut. Seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah, dari tahun 1966 hingga 1998, Jawa Timur pun hanya memiliki satu gubernur dari kalangan sipil yakni Mohammad Noer yang memimpin sejak tahun 1967 hingga 1976. Noer berlatar belakang pegawai pangreh praja sejak era kolonial.

Pasca Orde Baru, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Dalam momen kontestasi tersebut, banyak aktor-aktor yang

---

<sup>1</sup> Ikrar Nusa Bhakti, *Tentara Mendamba Mitra*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hlm. 31.

berasal dari kalangan militer mengambil peluang untuk menjadi kepala daerah. Tulisan ini mencoba menganalisis, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilud Indonesia? Dan strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya? Serta bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik?.

### **Militer dan Pemilu: Telaah Teoritik**

Partisipasi warga negara dalam pemilihan umum merupakan komponen fundamental dari masyarakat demokratis.<sup>2</sup> Hal ini diakui oleh masyarakat internasional bahwa semua manusia harus memiliki hak untuk memilih dan untuk mencalonkan diri dalam pemilu.<sup>3</sup> Selain itu, setiap orang berhak atas akses yang sama ke layanan publik. Oleh karenanya, ketimpangan atau diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya harus dilarang.<sup>4</sup>

Peran militer dalam masyarakat memiliki dampak langsung terhadap keterlibatan militer dalam pemilihan umum. Setidaknya ada dua pendekatan mengenai peran militer dalam pemilu. Pandangan pertama menyatakan bahwa militer adalah bagian integral dari masyarakat dan memiliki tanggung jawab politik dalam tatanan demokrasi dan supremasi hukum dalam negara. Dalam pandangan ini peran militer dalam politik dan pemilu dianggap tidak dapat menimbulkan ancaman terhadap demokrasi. Dalam kaitan ini, negara mendorong dan mendukung kegiatan politik militer baik di ranah legislatif maupun eksekutif. Namun demikian, beberapa tingkat netralitas politik prajurit harus dijamin.<sup>5</sup> Hal ini ditunjukkan dengan adanya efektifitas militer dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Di Denmark misalnya, sebagai aturan umum,

<sup>2</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 21 dan Pasal 25 ICCPR

<sup>3</sup> Komisi Venesia, Pedoman Pemilihan Umum, yang diadopsi oleh Komisi Venesia pada Sesi ke-51. (Venesia, 5-6 Juli 2002), <http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD>

<sup>4</sup> Pasal 26 ICCPR.

<sup>5</sup> G. Nolte (ed.), *Sistem Hukum Militer Eropa*, 2003, hlm. 371.

personel militer dapat memilih dan mencalonkan diri dalam pemilu. Pembatasan tertentu dapat dikeluarkan hanya dalam situasi darurat oleh Kementerian Pertahanan.<sup>6</sup> Militer tidak dilihat sebagai ancaman potensial terhadap tatanan demokrasi dan dapat secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sedangkan di Jerman untuk partisipasi prajurit dalam pemilihan sebagai pemilih dan kandidat didasarkan pada konsep "citizen in uniform" yang memungkinkan tentara untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan politik negara. Keterlibatan tentara seperti itu telah didorong oleh konstitusi dan hukum perundang-undangan Jerman di mana hak prajurit untuk memilih tidak dibatasi dalam hal apapun.<sup>7</sup> Selain itu, tentara dapat mencalonkan diri untuk pemilihan umum dan memegang jabatan publik pilihan di negara federal (regional), tingkat lokal dan Eropa. Tugas dinas mereka ditangguhkan selama masa keanggotaan tentara di badan masing-masing.

Situasinya serupa di Austria di mana tentara menikmati hak memilih yang aktif dan hak mencalonkan diri dalam pemilihan. Hal ini dikarenakan personil militer memiliki akses ke semua posisi publik. Para prajurit yang menjalankan mandat publik dapat diberikan bebas cuti atau dibebaskan dari tugas militer. Solusi ini memungkinkan untuk memisahkan tugas militer dari tugas yang terkait dengan mandat publik. Undang-Undang Pemilihan Parlemen Latvia menyediakan hak prajurit untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, namun, dalam kasus di mana individu dikonfirmasi sebagai kandidat resmi selama pemilihan, mereka harus mendapatkan cuti dari jabatannya.

Pandangan kedua mengatakan bahwa militer perlu dikontrol secara ketat oleh otoritas pertahanan masing-masing dalam kegiatan politik termasuk pemilu. Pembatasan hak memilih dan dipilih militer dapat dibenarkan karena kegiatan politik militer tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas demokratis angkatan bersenjata. Hal ini dikemukakan oleh Robin Luckham yang mengidentifikasi beberapa isu penting

<sup>6</sup> Jensen, "Military Law in Denmark", dalam Nolte (ed.), *European Military Law Systems*, hlm. 249.

<sup>7</sup> Nolte dan Krieger, "Military Law in Germany", dalam Nolte (ed.), *European Military Law Systems*, (Berlin, 2003), hlm. 371.

terkait posisi militer.<sup>8</sup> *Pertama*, mencegah terhadap intervensi militer ke dunia politik atau mencegah militer tidak membentuk tatanan politik baru yang sesuai dengan kepentingannya. *Kedua*, adanya kontrol terhadap hak-hak istimewa dan struktur birokrasi militer. *Ketiga*, kemapanan militer yang memperoleh hak-hak istimewa dalam rezim otoritarian, sehingga ketika demokratisasi dimulai, militer tetap enggan melepas hak-hak istimewanya. *Keempat*, perilaku dan komitmen pemerintah sipil yang baru terhadap demokrasi.

Kondisi di atas menurut Samuel P. Huntington hanya dapat dilakukan dengan cara meningkatkan profesionalisme angkatan bersenjata, mengorientasikan kembali militer dari misi keamanan dalam negeri ke misi keamanan luar negeri, mengurangi staf yang berlebihan, dan menghapuskan tanggung jawab non-militer.<sup>9</sup> Tugas berat ini tentu saja membutuhkan konsolidasi dan menjadi tanggung jawab pemerintahan demokratis baru yang dipimpin oleh sipil.

Selain itu, harus ada upaya untuk mereduksi pengaruh militer secara gradual, dan sipil harus mampu mengontrol seluruh seluk beluk militer (strategi, struktur kekuatan, persenjataan, inteljen, anggaran, dan kebijakan yang berkaitan dengan sektor keamanan). Strategi ini, menurut Larry Diamond, membutuhkan perubahan secara inkremental, melalui proses tawar-menawar, dialog, serta membangun konsensus ketimbang membuka konfrontasi. Sementara itu rezim demokratis yang baru harus memastikan bahwa militer tidak akan mencoba untuk melakukan kudeta dan mengganggu kekuasaan sipil. Kondisi ini hanya dapat dilakukan apabila ada kontrol sipil yang kuat.<sup>10</sup> Oleh karena itu, negara harus mendorong sebuah lingkungan militer yang independen sehingga kelompok sipil yang beraneka ragam tidak memaksimalkan kekuasaan

<sup>8</sup> Robin Luckhman, "Democracy and Military: An Epitaph for Frankenstein's Monster?" *Journal Democratization*, Vol. 3, No.2, (Summer 1996).

<sup>9</sup> Samuel P. Huntington, *The Third Wave of Democratization in The Late Twentieth Century* (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), hlm. 58.

<sup>10</sup> Larry Diamond and Marc Plattner (eds), *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 20-21.

mereka dalam urusan-urusan militer dengan melibatkan mereka dalam urusan-urusan politik.

Turki mewakili konsep netralitas politik tentara yang luas. Menurut pasal 67 Konstitusi dan pasal 7 Undang-undang tentang Ketentuan Utama tentang Pemilihan dan Daftar Pemilih, "para prajurit dan orang-orang yang terdaftar serta para taruna tidak dapat memilih". Selain itu, kemampuan seseorang untuk menduduki jabatan publik tergantung pada apakah ia telah melakukan wajib militer. Pada saat yang sama, "mereka yang belum menyelesaikan dinas militer dan anggota angkatan bersenjata yang tidak melepaskan tugas mereka, tidak dapat menjadi kandidat dan anggota parlemen terpilih".<sup>11</sup> Mereka juga tidak dapat dipilih sebagai walikota atau sebagai anggota dari dewan provinsi dan kotamadya.

Sedangkan di Luksemburg, angkatan bersenjata dapat memilih dalam pemilihan, tetapi mereka tidak dapat mencalonkan diri untuk pemilihan atau memegang jabatan publik.<sup>12</sup> Menurut Kode Administrasi Luksemburg (Pasal 54), mandat dari Anggota Parlemen tidak kompatibel dengan petugas servis sedang bertugas. Peraturan ini untuk mencegah penggabungan kekuatan legislatif dan publik. Pembatasan ini lebih luas jangkauannya di Rumania daripada di negara demokrasi lain yang sedang ditinjau karena membatasi kemampuan tentara untuk dipilih bahkan untuk posting di lembaga kota.

Namun jika pembatasan peran militer akan dilakukan maka setidaknya hal tersebut dilakukan mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut;

#### **a) Prinsip Legalitas**

Prinsip pertama yang diterapkan dalam hal ini adalah prinsip legalitas. Pembatasan atas hak pemilihan prajurit harus diberikan oleh hukum, yang harus menjamin tingkat transparansi dan non-diskriminasi di dalam angkatan bersenjata selama pemilihan. Misalnya, di Polandia dan Spanyol, hak pemilihan prajurit, khususnya hak mereka untuk ikut pemilihan, dibatasi oleh

<sup>11</sup> The Turkish Constitution, Pasal. 76

<sup>12</sup> Military Law in Luxembourg, dalam Nolte (ed.), *European Military Law Systems*, hlm. 529.

konstitusi negara masing-masing. Selain itu, konstitusi suatu negara dapat memuat ketentuan-ketentuan yang secara tidak langsung membatasi hak prajurit untuk ikut pemilihan.<sup>13</sup>

Peran militer selama pemilu juga dapat ditentukan oleh undang-undang. Tingkat transparansi yang signifikan dalam hal ini dapat dijamin oleh pertimbangan parlemen tentang masalah-masalah tersebut. Jika hak elektoral para prajurit sampai batas tertentu diatur oleh tindakan administratif lembaga eksekutif suatu negara, mereka harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

### ***b) Prinsip Proporsionalitas***

Prinsip lain yang harus diterapkan pada pembatasan hak pemilihan prajurit adalah asas proporsionalitas. Ini berarti bahwa hak-hak prajurit untuk berpartisipasi dalam pemilihan atau untuk menduduki jabatan-jabatan publik yang dipilih dapat dibatasi hanya sejauh yang dapat diterima dalam masyarakat demokratis - dan diperlukan untuk disesuaikan dengan tujuan pertahanan atau kebutuhan khusus angkatan bersenjata. Tujuan pertahanan dan kebutuhan khusus angkatan bersenjata, termasuk masalah disiplin dan keefektifan militer, ditetapkan dalam konstitusi dari masing-masing negara. Dengan demikian, negara tetap mempertahankan batas utama penghargaan untuk memutuskan apa yang dapat diterima dan pembatasan proporsional hak pemilihan prajurit dalam situasi tertentu.

### **Dinamika Peran TNI dalam Pemilu: Masa Orde Lama**

Intervensi militer dalam pemilu dimulai sejak tahun 1955 yakni pada pemilu pertama di Indonesia. Saat itu militer memiliki hak memilih dan hak dipilih. Hanya saja militer tidak mendapat jatah kursi di Parlemen.

Dua tahun setelah pemecatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menyusul unjuk kekuatan yang dikenal sebagai insiden 17 Oktober 1952, Jenderal Abdul Haris Nasution mendirikan IPKI sebagai “organisasi depan tentara” bersama dengan tokoh militer lainnya

seperti Gatot Soebroto dan Azis Saleh, dan dengan dukungan kesultanan Yogyakarta.<sup>14</sup> Partai ini berisikan bekas-bekas pejuang di masa revolusi. Bekas pelarian Tentara Belanda yang belakangan jadi aktivis HAM, Poncke Pricen, juga pernah sebentar jadi wakil IPKI di Parlemen. Partai ini dikenal sebagai partainya Angkatan Darat. Orang kepercayaan Nasution di Angkatan Darat, Ahmad Sukendro bahkan pernah jadi ketuanya. Begitu juga istri dari Kolonel Hidayat, Ratu Aminah.<sup>15</sup>

Menurut seorang ahli sejarah, pendirian IPKI dilandasi atas ketidakmampuan Nasution untuk menentang Soekarno secara frontal. Oleh sebab itu, ia mengatur strategi sendiri. Setelah dicopot dari posisinya, Nasution berpidato bahwa revolusi belum selesai. Bahkan, dalam kampanye partai IPKI tahun 1955 ia juga berpidato tentang hal tersebut. Nasution mendirikan IPKI pada dasarnya bertujuan untuk memberi kesempatan kepada tentara (untuk) berpolitik

Partai IPKI menargetkan personal militer dan keluarga mereka, dan veteran, khususnya di Jawa Barat dan pulau-pulau luar (non-Jawa). Meskipun Nasution menyalahkan partai-partai politik untuk negara, ia mengatakan bahwa ia tidak ingin pengambilalihan militer. Dia juga mengklaim bahwa Konstitusi Indonesia yang berlaku pada saat itu “terlalu barat”. Namun, kabinet melihat IPKI sebagai ancaman dan mencoba untuk membelenggunya dengan menuntut bahwa perwira Angkatan Darat wajib mengundurkan diri jika mereka ingin maju dalam pemilihan 1955 sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Konstitusi.

Pada pemilu 1955, partai itu mengajukan 167 calon di 11 dari 16 distrik pemilihan, tetapi hanya memenangkan 1,4% suara dan memberikannya empat dari 167 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagian besar suara, 81,7%, berasal dari Jawa Barat karena memperoleh dukungan dari Divisi Siliwangi.

---

<sup>14</sup> Herbert Feith dan Lance Castles (editor), *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, (Jakarta : Equinox Pub., 2007), hlm. 405.

<sup>15</sup> Ulf Sundhaussen, *The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967*, (UK: Oxford University Press, 1982), hlm. 89.

---

<sup>13</sup> Undang-undang Hungaria No. XCV tahun 2001.

Intervensi militer terhadap pemilu 1955 tampak semakin jelas ketika dukungan penuh terhadap IPKI datang dari Divisi Siliwangi secara terang-terangan. Divisi Siliwangi Jawa Barat memberi dukungan berupa angkutan dan bahkan uang bagi orang-orang yang berkampanye untuk Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Selain itu sejumlah perwira terkemuka dari Divisi Sriwijaya di Sumatera Selatan berkampanye untuk IPKI, demikian juga seorang panglima di Kalimantan.

Perwakilan IPKI-- Dahlan Ibrahim menjabat sebagai menteri untuk urusan veteran di Kabinet Ali Sastroamidjojo Kedua, tetapi pada bulan Desember 1956 partai menariknya sebagai protes atas ketidakmampuan pemerintah untuk menangani serangkaian pemberontakan daerah yang dipimpin oleh personil tentara yang tidak puas, yang pada akhirnya mengarah pada Pemberontakan PRRI.<sup>16</sup> IPKI juga menyerukan agar kabinet mengundurkan diri dan digantikan oleh mantan wakil presiden Mohammad Hatta. Pemberontakan ini menyebabkan kabinet runtuh, dan digantikan oleh Kabinet Kerja, di mana Azis Saleh menjabat sebagai menteri kesehatan.<sup>17</sup>

Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) yang dibentuk untuk menyusun konstitusi tidak berjalan karena adanya isu tentang peran Islam dalam berbagai pemberontakan di daerah.<sup>18</sup> Pada tahun 1959, IPKI secara terbuka menyerukan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli, dan pada konferensi tahun itu pula IPKI meminta Presiden Soekarno untuk menerapkannya, namun Mahkamah Agung tidak dapat melakukannya. Pada bulan Juni, IPKI membentuk "Front untuk Pertahanan Pancasila". Mereka mengajak 17 partai kecil dan memulai boikot terhadap Mahkamah Agung. IPKI juga berhasil membujuk Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk bergabung dengan boikot MA, yang berarti Majelis tidak

bisa lagi berfungsi. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno memberlakukan kembali UUD 1945 dengan dekrit, dan juga membubarkan MA.<sup>19</sup>

Pada 5 Maret 1960, Soekarno menangguk badan legislatif dan mengumumkan penunjukkan sebuah badan untuk menggantikannya, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dari Bantuan Bersama (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, DPR – GR). Badan ini tidak akan mencakup partai-partai yang lebih kecil, dan dalam hal apapun, IPKI tidak lagi diperlukan karena Angkatan Darat akan diberikan kursi mereka sendiri. Namun, A.H Nasution berhasil membujuk Soekarno untuk tidak melarang IPKI dan kemudian IPKI diberi kursi.<sup>20</sup>

Ketika periode Demokrasi Terpimpin berlanjut, IPKI mulai menentang Soekarno, dan pada akhir tahun 1966 bergabung dengan sekelompok partai-partai yang menyerukan tatanan politik baru. Lima tahun setelah upaya kudeta Gerakan 30 September yang menyebabkan kejatuhan Soekarno dan dimulainya rezim Orde Baru, IPKI adalah salah satu dari sembilan partai yang bersama dengan kendaraan rezim Soeharto yakni Golkar bersaing dalam pemilihan umum tahun 1971. IPKI memenangkan kurang dari satu persen suara sehingga tidak memilikikursi di parlemen. Pada tahun 1973 IPKI bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia.

### **Dinamika Peran TNI dalam Pemilu: Masa Orde Baru**

Pasca tragedi 30 Oktober 1966, Soekarno yang menyadari kedudukannya kian terjepit, dalam pidato tahunan 17 Agustus 1966 "menantang" Soeharto untuk menguji kepopulerannya. Melalui pidato yang dikenal dengan nama "Jasmerah" (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah) tersebut, Soekarno hendak mempertaruhkan popularitasnya melalui pemilihan umum.

Tuntutan untuk segera dilaksanakannya pemilihan umum sebenarnya telah dibicarakan di dalam Sidang Umum MPRS IV yang menghasilkan Tap MPRS No.IX/MPRS/1966.

<sup>16</sup> Feith Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Jakarta: Equinox Publishing –Asia Pte Ltd, 2007), hlm. 533.

<sup>17</sup> Daniel S Lev, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959*, (Jakarta: Equinox Publishing-Asia, 2009), hlm. 26-34.

<sup>18</sup> M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1200*, (Stanford: Stanford University Press, 1991), hlm. 252-254.

<sup>19</sup> Ulf Sundhaussen, *The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945-1967*, (UK: Oxford University Press, 1982), hlm. 136.

<sup>20</sup> Ulf Sundhaussen, *The Road to Power..*, hlm. 146-148.

Para politisi partai termasuk yang paling bersemangat untuk segera melaksanakan pemilihan umum. Partai-partai politik, terutama PNI dan NU, menyadari bahwa mereka memiliki basis-basis pendukung massa di daerah. Mereka memperkirakan basis pendukung pada pemilihan umum 1955 masih berlaku dan bertahan.

Angkatan Darat mungkin tidak bersemangat menyelenggarakan pemilihan umum, namun di sisi lain tidak dapat mengelak dari tuntutan untuk diadakannya pemilihan umum. Hal ini terkait pula dengan retorika politik Orde Baru tentang pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, di mana memandang pelaksanaan pemilu sebagai salah wujud aktualisasi demokrasi sebagaimana digariskan UUD 1945.<sup>21</sup> Maka dalam Seminar Angkatan Darat di Bandung bulan Agustus 1966, Angkatan Darat menerima kenyataan bahwa pemilihan umum harus diadakan sesuai dengan keputusan MPRS dalam Sidang Umum MPRS IV, yang menetapkan penyelenggaraan pemilihan umum selambat-lambatnya 5 Juli 1968, namun dengan syarat bahwa kekuatan-kekuatan Pancasila harus menang dalam pemilihan umum.

Seminar yang bertujuan merumuskan program politik bagi Angkatan Darat itu diikuti oleh perwira-perwira senior Angkatan Darat dan para penasehat sipil yang terdiri dari sekelompok ekonom dari Universitas Indonesia yang mendapat didikan Barat. Seminar juga menerima usul untuk mencetuskan gagasan sistem pemilihan umum yang diperkirakan tidak akan menguntungkan partai-partai politik. Sebaliknya, dengan sistem pemilihan baru nantinya memungkinkan kekuatan-kekuatan politik baru menjadi tantangan bagi partai-partai politik.<sup>22</sup>

Terkait rencana tersebut, Angkatan Darat yang belum merasa siap, memandang perlu untuk mengulur-ulur jadwal pelaksanaan pemilihan umum. Bahkan militer justru mengangkat isu perlunya perombakan sistem struktur politik, yang tidak saja meremehkan arti pemilihan umum bahkan menuntut pembubaran partai-

partai politik. Militer menggunakan kalangan intelektual, mahasiswa, pemuda, dan anggota kesatuan aksi untuk mendorong tuntutan perombakan struktur politik. Hingga memasuki tahun 1968, ketika Soekarno benar-benar jatuh dari kedudukannya, tuntutan pembaruan struktur politik mengemuka kembali.. Mayjen H.R. Dharsono dan tokoh-tokoh AD lainnya, terutama kaum militan yang anti partai, mengemukakan bahwa rintangan-rintangan utama yang dihadapi pada masa itu adalah struktur politik yang masih menganut ideologi dan sistem banyak partai. Mayjen Kemal Idris, yang juga anti partai, pernah meminta agar Presiden Soeharto mengambil tindakan cepat untuk membersihkan semua sisa loyalis Orde Lama di lembaga-lembaga pemerintahan. Sikap militansi anti partai ini jelas terlihat pada perwira-perwira Divisi Siliwangi Jawa Barat. Beberapa jenderal penting seperti Nasution dan Panglima Siliwangi Dharsono, sangat mendukung dilaksanakannya sistem distrik bagi wakil-wakil daerah pemilihan. Sikap kompromi pemerintah dengan partai-partai amat mengecewakan kelompok Siliwangi.<sup>23</sup>

Pada tahun 1967, dengan dukungan penuh dari Panglima Siliwangi dan rekannya Panglima Kostrad, Kemal Idris, menyiarkan suatu rencana menjalankan sistem Dwi Partai di Jawa Barat. Rencana tersebut mempertimbangkan dibubarkannya partai-partai yang ada untuk diganti dengan dua partai baru yang keduanya merupakan pemerhati modernisasi dan pembangunan, akan tetapi berbeda dalam hal program yang ditawarkan.

Awal tahun 1969, dengan sedikit modifikasi gagasan itu tiba-tiba muncul dalam bentuk dewan-dewan perwakilan lokal di beberapa kabupaten di Jawa Barat, yang tak lain muncul akibat tekanan keras tentara terhadap partai-partai. Namun, segera diperintahkan kepada Dharsono untuk menghentikan pelaksanaan sistem Dwi Partai menyusul protes dari para pimpinan partai di Jakarta. Di antara kalangan pembaharu, semangat anti ideologi partai memang terasa kuat, agaknya sisa-sisa anti-PKI maupun politik Nasakom masa Demokrasi Terpimpin, yang memberi legitimasi bagi perkembangan orientasi ideologi. Orientasi ideologi tersebutlah yang

<sup>21</sup> Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1974), hlm. 62-63.

<sup>22</sup> Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986), hlm. 280.

<sup>23</sup> Harold Crouch, *Militer dan Politik..*, hlm. 283-384.

pada akhirnya menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Dengan alasan tertunda-tundanya pembahasan RUU Pemilihan Umum, Pejabat Presiden Soeharto berhasil “meyakinkan” pimpinan MPRS bahwa pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan MPRS yaitu selambat-lambatnya 6 Juli 1968. Akhirnya melalui Sidang Umum V MPRS ditetapkan penundaan waktu penyelenggaraan pemilihan umum, yakni selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1971. Alasannya adalah, adanya rintangan-rintangan utama yang dihadapi pada masa terkait struktur politik yang masih menganut ideologi dan sistem banyak partai.

Tuntutan-tuntutan perombakan struktur politik semakin meluas, bahkan pada pertengahan 1969 muncul gagasan perombakan struktur melalui dekrit presiden. Namun, Soeharto memilih jalan yang nampak demokratis. Soeharto mengemukakan bahwa dia tidak akan mengubah struktur politik dengan paksaan, lebih-lebih dengan membubarkan partai-partai politik.

Peranan politik Ali Moertopo berkaitan dengan persoalan politik utama yang dihadapi Orde Baru pada saat kelahirannya, adalah bagaimana menata dan membangun kembali sistem politik Indonesia yang porak-poranda. Ali Moertopo menilai sistem politik sebelumnya terbukti rapuh akibat ketidakmampuan menjaga kestabilan sebagai akibat dari persaingan dan pertentangan politik yang semakin tidak sehat. Pemusatan berlebih pada politik dan kekuasaan mengakibatkan perhatian pada aspek-aspek lain dari kehidupan masyarakat menjadi merosot. Maka, permasalahan pokok yang dihadapi Orde Baru pada waktu kelahirannya adalah bagaimana membangun suatu sistem politik yang dapat diandalkan guna memungkinkan penataan pembangunan ekonomi dan bidang-bidang lainnya.<sup>24</sup>

Dalam upaya penataan struktur politik inilah, Ali Moertopo memainkan langkah-langkah penggalangan. Menghadapi pemilihan umum 1971, operasi penggalangan Ali Moertopo memainkan peranan menonjol. Ia mengorganisasi serangkaian operasi intelijen politik melalui

<sup>24</sup> Brian May, *The Indonesia Tragedy*, (Singapore: Graham Brash, 1978), hlm. 234.

gerakan-gerakan bawah tanah yang bertujuan memperlemah partai-partai politik dan organisasi-organisasi profesi, dan di lain pihak untuk memperkuat Sekber Golkar.<sup>25</sup>

Untuk meyakinkan bahwa Sekber Golkar akan bertindak efektif dalam pemilihan umum nanti, dibentuklah Bapilu (Badan Pengendali Pemilihan Umum) di bawah pimpinan Ali Moertopo sendiri. Bapilu, sebagai perangkat operasional Golkar, selanjutnya bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan usaha-usaha untuk memenangkan Golkar dalam pemilihan umum 1971. Dasar strategi Bapilu amat sekuler, dan sebagian besar di dalamnya terdiri dari bekas aktivis kesatuan-kesatuan aksi yang mendukung pemikiran pembaharuan. Bapilu yakin akan kebutuhan modernisasi politik di Indonesia.

Operasi-operasi Opsus memainkan peranan amat penting dalam memperkuat Sekber Golkar. Pelaksanaan Opsus biasanya dengan jalan melakukan intervensi pada rapat-rapat atau musyawarah partai dan kemudian memanipulasi konvensi-konvensi partai yang telah ada untuk menciptakan krisis kepemimpinan, yang pada gilirannya pemerintah berkesempatan mendorong kepemimpinan yang akomodatif dengan pemerintah. Pelaksanaan Opsus juga untuk menjamin bahwa kelompok-kelompok yang mungkin dapat mengobarkan permusuhan, tidak memegang kendali organisasi yang masih dapat menghimpun dukungan besar.<sup>26</sup>

Target utama adalah partai nasionalis terbesar, PNI. Operasi yang dikerjakan Opsus menghasilkan terpilihnya Hadisubeno, menyingkirkan Hardi yang dikenal sebagai pengecam peranan Dwi-Fungsi ABRI. Lalu, operasi terhadap partai kecil IPKI, dari kelompok nasionalis lainnya, sehingga kongres tahunan dalam bulan Mei 1970 menghasilkan pimpinan yang pro pemerintah.<sup>27</sup>

Perlakuan yang sama juga menimpa PWI, suatu organisasi wartawan Indonesia. Kongres PWI 22 Oktober 1970 berakhir dengan kekisruhan

<sup>25</sup> Tempo, “Ali Moertopo Telah Pergi”, (28 Mei 1984).

<sup>26</sup> Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986), hlm. 297.

<sup>27</sup> Masashi Nishihara, *Golkar and the Indonesia Election of 1971*, (New York: , Cornell University, 1972), hlm. 21.

besar karena munculnya dua badan eksekutif sekaligus, yang salah satunya dilaporkan memperoleh dukungan dari Opsus. Kekisruhan makin menjengkelkan dengan pengakuan dari para pejabat pemerintah kepada badan eksekutif dukungan Opsus. Operasi-operasi yang sama pada kurun waktu yang hampir bersamaan ditujukan kepada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan Persahi (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia). Untuk mendukung pemilu masa Orde Baru, militer juga mendukung proses fusi partai politik yang ada. Bahkan salah satu partai yang pernah didirikan oleh militer yakni IPKI dalam proses fusi tersebut bergabung dalam PDI.

Dalam proses selanjutnya, keterlibatan militer Indonesia pada pemilu-pemilu di Indonesia sepanjang Orde Baru lebih berperan sebagai alat rezim Soeharto untuk memenangkan Golkar pada pemilu-pemilu yang berlangsung selama lebih dari 32 tahun. Melalui dwi fungsi ABRI, militer dengan leluasa melakukan berbagai intervensi dalam proses pemilu yang ada. Kegiatan yang sering dilakukan oleh militer dalam memenangkan Golkar pada masa Orde Baru adalah dengan melakukan, *Pertama*, intervensi terhadap partai politik selain Golkar untuk memenangkan Golkar dalam pemilu-pemilu Orde Baru; *Kedua*, intimidasi dan kekerasan pada individu atau kelompok masyarakat yang tidak memilih Golkar.

Intervensi militer kepada partai-partai politik guna memenangkan Golkar dalam pemilu-pemilu masa Orde Baru terlihat jauh sebelum dilakukannya pemilu pertama era Orde Baru. Tahun 1966 ketika PNI mengadakan kongres di Bandung, kepemimpinannya yang tadinya dipegang oleh Ali Sastroamidjojo-Surachman digantikan oleh Osa Maliki-Usep Ranawidjaja, karena campur tangan militer. Pertarungan antara kubu Ali-Sartono dan Osa-Usep pada Kongres PNI di Bandung 24-27 April 1966 berlangsung dalam suasana penuh kecurigaan. Aparat keamanan dari Kodam Siliwangi ikut mengamankan jalannya sidang. Keuntungan tampaknya berada pada kelompok Osa-Usep yang didukung oleh pihak militer dan KAMI Bandung.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Paulus Widiyanto, "Osa Maliki dan Tragedi PNI Konflik Intern Pra dan Pasca 1965" *Prisma Edisi Khusus, 20 Tahun*

Intervensi militer pada partai politik dalam persiapan pemilu 1971 juga dilakukan kala militer membekukan PNI di seluruh Sumatera oleh Panglima Daerah Militer. Namun demikian, melalui instruksi Presiden No. 16/1967 kepada Gubernur/Kepala Daerah dan Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban Daerah, PNI di seluruh Sumatera dikembalikan lagi guna memberi kesempatan kepada PNI melaksanakan kristalisasi dan kondolidasi, kecuali PNI di Aceh yang telah membubarkan diri.<sup>29</sup>

Nasib serupa juga menimpa Parmusi tahun 1967 saat melakukan Muktamar I di Malang. Terpilihnya Mohammad Roem sebagai ketua, akhirnya dikudeta oleh seorang militer bernama Naro dan Imran Kadir. Kala itu sidang yang dipimpin oleh Djarnawi Hadikusumo/Lukman Harun yang dianggap melanggar komitmennya dengan pemerintah. Lalu pemerintah merestui Parmusi di bawah kepemimpinan H.M.S. Mintaredja yang dianggap lebih moderat.<sup>30</sup>

Hal sama dilakukan militer pada PSII setelah pemilu 1971. Pada Muktamar PSII di Majalaya--Jawa Barat, terpilihnya H.M. Ch. Ibrahim, Presiden Lajnah Tanfidiah, dan H. Warton, yang dianggap berhaluan keras terhadap pemerintah, dan akhirnya dengan bantuan militer digantikan kelompok Anwar Tjokroaminoto, Syarifuddin Harahap, H. Th. M. Gobel, dan Dr. Farid Bakry Laksamana, yang "dianggap pro pemerintah".<sup>31</sup>

Meskipun fusi partai-partai politik telah dilakukan sesuai dengan rancangan rezim Orde Baru, namun keterlibatan militer dalam pemilu-pemilu melalui intervensi partai politik tetap dilakukan oleh militer. Hal ini misalnya terlihat pada munculnya konflik di partai politik di mana penyelesaiannya melibatkan militer. Tahun 1974, konflik kembali muncul dalam tubuh PDI, antara unsur PNI, kelompok Isnaeni-Sunawar dengan kubu Sanusi Hardjadinata Usep Ranuwidjaya. Konflik dipicu oleh perbedaan antar kubu tentang

---

*Prisma 1971 -1991*, hlm. 30-31.

<sup>29</sup> Paulus Widiyanto, "Osa Maliki dan...", hlm. 37

<sup>30</sup> A. Gaffar Karim, *Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 62-69.

<sup>31</sup> Valina Singka Subekti . *Partai Syarikat Islam Indonesia: Konstestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1994), hlm. 31-33.

pelaksanaan Kongres I. Kubu Isnaeni-Sunawar tidak menghendaki kongres karena dianggap terlalu cepat. Di pihak lain disebutkan bahwa konflik bermula dari keinginan PNI mendominasi kepanitiaan kongres, sebagaimana disepakati dalam Munas PNI, 2-3 Pebruari 1974. Akibatnya Isnaeni dan Abdul Madjid ditarik dari jabatannya, masing-masing dari jabatan ketua I dan sekjen PNI, dan kongres I ditunda pelaksanaannya.<sup>32</sup>

Untuk menyelesaikan hal tersebut dilakukan konsultasi dengan Ka-Bakin, 15 Februari 1974, Kaskopkamtib Soedomo, 16 Februari 1974, Mendagri, 27 Februari 1974 dan terakhir dengan Presiden. Akhirnya kubu Isnaeni-Sunawar, digantikan oleh Sanusi Hardjadinata yang didampingi oleh Usep Ranawidjaja. Kubu terakhir ini dianggap lebih moderat dan dekat dengan pemerintah dan militer saat itu.

Konflik-konflik yang terjadi di partai politik pada masa Orde Baru biasanya terjadi menjelang pelaksanaan pemilu. Keterlibatan dalam militer pada konflik-konflik tersebut pada dasarnya untuk memecah belah partai politik dan juga memilih figur ketua partai yang dianggap dekat dengan rezim Orde Baru dan militer. Tujuannya tentu saja sangat jelas, yakni melakukan kooptasi pada partai politik di satu sisi, dan memenangkan Golkar di sisi lain.

Menjelang runtuhnya Orde Baru, militer dan rezim Orde Baru juga melakukan intervensi pada Konggres Partai Demokrasi Indonesia yang menelan banyak korban jiwa. Peristiwa tersebut dikenal sebagai peristiwa kuda tuli (tragedi 27 Juli). Tragedi 27 Juli 1996, bermula saat terjadinya dualisme di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (nama awal PDIP). Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, menyerbu dan menguasai Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang dikuasai Ketua Umum PDI kongres Surabaya, yaitu Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan ini diduga kuat melibatkan unsur militer, terutama dari Komando Daerah Militer Jaya. Karena saat itu, Pemerintah yang dipimpin Presiden Soeharto tidak menyukai dan memberi restu pada PDI pimpinan Megawati.

Dugaan keterlibatan tentara ini semakin menguat setelah adanya pengakuan dari Yorrys

<sup>32</sup> Adriana Elisabeth, dkk, *PDIP dan Prospek Pembangunan Politik*, (Jakarta: Grassindo, 1991), hlm. 50-55.

Raweyai yang kala itu aktif fdi Pemuda Pancasila. Politikus Partai Golkar ini ditahan polisi setelah kejadian tersebut karena terbukti mengerahkan massa “untuk mengamankan lingkungan” kantor PDI pimpinan Megawati. Pengerahan itu, kata dia, dilakukannya atas perintah Asisten Intelijen Kodam Jaya, Kolonel Haryanto. Tak lama setelah Yorrys ditahan, salah seorang pengacaranya melemparkan bola panas. “Mustahil Kolonel Haryanto meminta Yorrys tanpa ada perintah atasan,” kata dia sebagaimana dikutip dari Majalah Tempo edisi 24 April 2000. Meski tidak menyebut nama, tudingan itu tepat mengarah kepada Sutiyoso, yang kala itu menjabat Panglima Kodam Jaya. Benar saja, akhir tahun 2004, Polisi menetapkan Sutiyoso sebagai tersangka.<sup>33</sup>

Dalam insiden yang menyebabkan lima orang meninggal dunia ini, Susilo Bambang Yudoyono (SBY), yang menjadi bawahan Sutiyoso tak luput dari pemeriksaan polisi walau hanya berstatus sebagai saksi. Namun, pemeriksaan terhadap SBY di tengah pertarungan pemilu presiden melahirkan tudingan bahwa ada nuansa politis dalam kasus ini. Sebab, SBY adalah pesaing Megawati dalam Pemilihan Presiden 2004.

### **Dinamika Peran TNI dalam Pemilu: Pasca Orde Baru**

Pada era pasca Orde Baru, peran militer dalam pemilu di Indonesia mengalami pasang surut. Dalam reformasi militer sepuluh tahun pertama, militer mulai mengambil jarak secara tegas dengan politik termasuk dalam pemilu. Namun demikian, pada dekade kedua masa reformasi, seiring dengan menguatnya sistem desentralisasi, militer mulai tergoda kembali pada politik elektoral yang ada. Jika pada masa Orde Baru, militer dalam pemilu hanya sebagai sarana rezim untuk memenangkan pemilu dengan segala tindakan represinya tidak demikian pada dekade kedua reformasi. Mereka berusaha untuk mendudukibkembali kursi yang kosong

<sup>33</sup> Fajar Pebrianto, *Begini Cerita Tragedi 27 Juli 1996 di PDIP yang Menyeret SBY*, 27 Juli 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1110993/begini-cerita-tragedi-27-juli-1996-di-pdip-yang-menyeret-sby/full&view=okFajar>, diakses pada 6 Oktober 2018.

dalam pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden.

Hal tersebut terlihat dengan kian bertambahnya calon bupati, gubernur dan presiden yang berasal dari militer meskipun untuk itu mereka harus mengundurkan diri dari profesinya. Pada tahun 2015 misalnya, terdapat empat orang yang berprofesi sebagai TNI aktif mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan satu orang menjadi wakil kepala daerah. Sedangkan pada tahun 2018, terdapat satu orang untuk calon gubernur yang berasal dari TNI, dan 3 orang sebagai calon wakil gubernur. Mereka adalah Letjen Edy Rahmayadi dalam Pilkada Sumatra Utara. Edy Rahmayadi masih aktif saat mendaftarkan diri ke KPU. Sedangkan calon wakil gubernur yang maju adalah Brigjen Edy Nasution dalam Pilkada Riau. Di tingkat kabupaten, terdapat 3 calon wakil bupati dari kalangan TNI. dua wakil bupati dari TNI.

Dua calon bupati dari kalangan TNI adalah AD Almost Berd Maliogha di Pilkada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, dan Mayjen TNI (Purn) Salim S. Mengga di Pilkada Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Sementara dalam pemilihan wali kota terdapat satu orang dari kalangan TNI yaitu Mayor Inf. David Suardi yang maju melalui jalur independen dalam Pilkada Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.<sup>34</sup>

Sedangkan pada pemilihan presiden lebih banyak didominasi oleh para purnawiran TNI sebagai bakal calon. Beberapa purnawiran TNI yang pernah mencalonkan diri menjadi presiden diantaranya adalah Jendral (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jendral (Purn) Wiranto, Jendral (Purn) Edy Sudrajat, Letjen (Purn) Sutiyoso, Jendral (Purn) Hartono dan Letjen (Purn) Prabowo yang maju untuk ketiga kalinya pada pemilu 2019. Untuk memenuhi ambisinya ketiga purnawirawan tersebut juga mendirikan partai politik. SBY mendirikan Partai Demokrat, Wiranto dengan Partai Hati Nurari Rakyat (Hanura). Sutiyoso bahkan mendorong

pembentukan beberapa partai kecil seperti Partai Republikan, Partai Bela Negara (PBN), serta Partai Nasional Banteng. Sedangkan (Mayjend Purn) Edy Sudrajat merupakan pendiri sekaligus inisiator terhadap berdirinya Partai Kedailan dan Persatuan Indonesia (PKPI), serta Hartono yang merupakan pendiri dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).

Dalam menunjang mesin politiknya, para mantan jenderal tersebut tidak sedikit yang melibatkan koleganya sebagai tim kampanye untuk meraih suara pada pemilihan presiden yang diikutinya. Wiranto misalnya menjadi calon wakil presiden pada pemilu tahun 2009. Ia menyertakan sejumlah koleganya yang berasal dari TNI seperti Letjen. (purn) Arie Mardjono dan Laksamana Muda (purn) Abu Hartono yang keduanya merupakan wakil ketua dalam dewan pertimbangan. Tujuh wakil ketua Hanura adalah Majen. (purn) Aqlani Maza dan Laksamana (purn) Bernard Kent Sondakh, Letjen. (purn) Fachrul Razi, Letjen. (purn) Suaidi Marassabessy dan Jenderal (purn) Soebagyo serta Marsyal Muda (purn) Budhy Santoso. Sedangkan di kubu Prabowo terdapat Mayjen. (purn) Muchdi Purwopranjoto yang merupakan wakil ketua, dan pensiunan perwira intel Mayjen. (purn) Gleny Kairupan. Di Kubu Demokrat, nama Letjen. (purn) Muhammad Yasin adalah figur purnawirawan yang dikenal loyal dengan SBY.

Pada Pilpres 2019, meskipun Joko Widodo (Jokowi) berasal dari kalangan sipil, namun dalam kontestasi pilpres yang diikuti tidak terlepas dari keterlibatan militer di dalamnya. Pada pemilu sebelumnya yakni tahun 2014 misalnya, kubu Jokowi membentuk Tim Bravo 5. Tim Bravo-5 ini terdiri dari para purnawirawan TNI yang sebagian besar merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1970-an, seangkatan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Tim ini terbentuk sejak 2013. Tujuannya untuk memenangkan Jokowi-JK di pemilu 2014.<sup>35</sup> Tim Bravo 5 sempat dibekukan setelah Jokowi terpilih menjadi presiden ini, namun, diaktifkan kembali dengan misi yang

<sup>34</sup> Islahudin, "Pilkada 2018: 569 Pasangan calon terdaftar, 16 orang dari TNI/Polri," <https://beritagar.id/artikel/berita/569-pasangan-calon-terdaftar-16-orang-dari-tnipolri>, diakses pada 12 September 2018.

<sup>35</sup> Tim Redaksi Kumparan, "Bravo-5 dan Cakra 19, Pasukan Jenderal Purn TNI di Belakang Jokowi", 23 Agustus 2018, " <https://kumparan.com/@kumparannews/bravo-5-dan-cakra-19-pasukan-jenderal-purn-tni-di-belakang-jokowi-1534995728310430493>, Diakses 12 November 2018.

sama, yakni untuk memenangkan Jokowi dan Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019.<sup>36</sup>

Selain Tim Bravo 5, Jokowi juga diperkuat dengan Tim Cakra 9 yang dibentuk pada bulan Agustus 2018. Tim yang juga diinisiasi oleh Luhut Binsar Pandjaitan ini bermarkas di Jalan Malabar Nomor 75, Setia Budi, Jakarta Selatan. Cakra 19 berisi purnawirawan TNI yang baru satu-dua tahun pensiun. Sebagian besar memiliki latar belakang personel baret merah alias Kopassus.<sup>37</sup>

Kelompok relawan Cakra 19 ini memiliki tugas: *Pertama*, memastikan Jokowi hanya memiliki satu lawan dalam kontestasi pilpres 2019. *Kedua*, memastikan pasangan capres nomor urut 01 (Jokowi-Ma'ruf) memenangi pilpres 2019 dengan persentase minimal 55 persen. Berbeda dengan divisi pemenangan lainnya, baik Bravo 5 maupun Cakra 9 memiliki tugas khusus yakni memenangkan Jokowi dalam pilpres 2019 di wilayah Jawa Barat.

Sedangkan di Kubu Prabowo dalam pemilihan presiden 2019 diperkuat oleh sederet purnawirawan jenderal TNI dari beragam matra. Para purnawirawan yang memiliki beragam latar belakang, dari Kepala Badan Intelijen Strategis sampai mantan menteri. Fungsi para purnawirawan TNI adalah menyukseskan kemenangan Prabowo di daerah-daerah melalui apa yang disebut dengan "perang teritori".

Berikut beberapa purnawirawan jenderal di Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga.<sup>38</sup>

1. Laksamana TNI (purn) Tedjo Edhy Purdijanto (Wakil Ketua Dewan Penasihat).

Tedjo Edhy adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

di era awal pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. Namun Tedjo terkena *reshuffle* kabinet hanya setelah sepuluh bulan menjabat menteri. Sebagai penggantinya, Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan. Tedjo bergabung dengan Partai Berkarya yang didirikan oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto pada 2016. Sebelumnya, dia bergabung dengan Partai NasDem. Tedjo semula menjabat posisi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya sebelum posisi itu akhirnya ditempati Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto yang hijrah dari Partai Golkar. Karena itu, kini Tedjo menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya.

2. Letnan Jenderal TNI (purn) Yunus Yosfiah (Wakil Ketua Dewan Penasihat) Yunus Yosfiah adalah mantan Menteri Penerangan era Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Lulusan Akademi Militer Nasional angkatan 1965 ini sempat menjabat sebagai Menteri Penerangan, sebelum jabatan itu dihapuskan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
3. Mayjen (Purn) Glenny Kairupan (Direktur Penggalangan)

Glenny merupakan teman seangkatan Prabowo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Akademi Militer angkatan 1970. Pada 2012, Glenny resmi bergabung dengan Partai Gerindra.

Glenny anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Almarhum Suhardi, Ketua Umum Partai Gerindra sebelum Prabowo, menyebut Glenny-lah yang menggalang dukungan dari bekas koleganya di Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian RI untuk berbondong-bondong masuk Gerindra.

Karir militer Glenny melesat saat konflik di Timor Timur hingga menjadi Komandan Komando Resor Militer (Danrem). Dia pernah diperiksa oleh Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timor Timur.

<sup>36</sup> Tim Redaksi Kumparan, "Bravo-5..",

<sup>37</sup> Dewi Nurita, "Beda Tim Purnawirawan TNI, Bravo 5 dan Cakra 19 di Tim Jokowi, 20 Oktober 2018,,"<https://nasional.tempo.co/read/1138098/beda-tim-purnawirawan-tni-bravo-5-dan-cakra-19-di-kubu-jokowi/full&view=ok>, Diakses pada 29 Oktober 2018.

<sup>38</sup> Budiarti Utami Putri, "Daftar Purnawirawan Jenderal TNI di Kubu Prabowo – Sandiaga," 19 Oktober 2018, [https://nasional.tempo.co/read/1138033/daftar-purnawirawan-jenderal-tni-di-kubu-prabowo-sandiaga?page\\_num=3](https://nasional.tempo.co/read/1138033/daftar-purnawirawan-jenderal-tni-di-kubu-prabowo-sandiaga?page_num=3) -, diakses pada 19 November 2018.

4. Letnan Jenderal TNI (purn) Yayat Sudrajat (Direktur Pengamanan dan Pengawasan)  
Yayat yang merupakan lulusan Akademi Militer 1982, kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Berkarya. Yayat pernah menjadi Direktur Kontraterorisme Deputy Bidang Kontra Intelijen Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Jabatan terakhirnya di pemerintahan adalah Sekretaris Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan.  
Pada Juli 2018, Yayat bergabung dalam deklarasi purnawirawan Komando Pasukan Khusus mendukung Prabowo. Dia menghadiri deklarasi itu meski Partai Berkarya belum memutuskan mendukung Prabowo di pilpres 2019
5. Laksamana Madya TNI (purn) Moekhlas Sidik (anggota Dewan Pengarah)  
Moekhlas Sidik merupakan purnawirawan Angkatan Laut yang bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2012. Setelah Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi meninggal, Moekhlas menjadi Ketua Harian untuk membantu Prabowo yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina. Moekhlas kini menjadi anggota Dewan Pengarah di Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga.
6. Mayor Jenderal TNI (purn) Judi Magio Yusuf (Wakil Ketua)  
Judi Margio Yusuf saat ini menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Setelah purnatugas di TNI, Judi lebih banyak berbisnis. Saat ini, dia Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Ancora Indonesia Resource Tbk (AIR). Dia menjadi wakil komisaris utama di perseroan yang bergerak di bidang pertambangan itu sejak 2012. Pada periode 2008-2012, Judi adalah komisaris utama. Judi juga merangkap sebagai komisaris PT Inti Karya Persada Teknik sejak 2007.
7. Brigadir Jenderal TNI (purn) Anwar Ende (Wakil Sekretaris)  
Anwar Ende pernah menjadi Komandan Pusat Intelijen Angkatan Darat (Pusintelad) pada 2004-2008. Di Partai Gerindra, Anwar anggota Dewan Pembina.
8. Mayor Jenderal TNI (purn) Musa Bangun (Sekretaris Eksekutif)  
Mantan Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat ini merupakan Ketua Umum Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR), organisasi sayap Gerindra. Organisasi ini merupakan wadah berkumpulnya para purnawirawan.
9. Mayor Jenderal TNI (purn) Arifin Seman (Direktur Monitoring, Analisa, dan Advokasi Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga) Arifin adalah anggota Dewan Pembina Partai Gerindra.  
Karir militer mengantarnya menjadi Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) pada 2009-2010. Dia juga pernah menjadi Tenaga Pengajar Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhanas. Sejak tahun ini, Arifin menjadi Direktur Utama PT Trimuda Nuansa Citra, perusahaan jasa pengiriman udara

Disamping nama-nama tersebut di atas, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santosa ditunjuk oleh kubu Prabowo sebagai Ketua Timses pasangan Prabowo-Sandiaga Uno pada pemilu 2019.

Maraknya keterlibatan militer aktif dan purnawirawan militer dalam pemilu sempat memunculkan adanya gagasan untuk memberikan hak politik (memilih dan dipilih) pada TNI dan Polri saat pemilihan umum. Pada tahun 2010, mantan Panglima TNI Jendral (Purn) Endriartono Sutarto mengatakan prajurit TNI harus bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2014 nanti. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sejak pemilu 2004 dan pemilu 2009, TNI telah membuktikan mampu keluar dari wilayah politik dan politik praktis. Namun demikian, untuk hak dipilih, Endriartono Sutarto menyatakan bahwa hal tersebut belum diperlukan.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Munawaroh, "Endriartono Sepakat Prajurit TNI Punya Hak Pilih Pada 2014," 4 Juli 2010, <https://nasional.te.mpo.co/>

Pernyataan Endriantono sendiri mendapat berbagai tanggapan. Menteri Pertahanan RI saat ini Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa wacana pemberian hak pilih bagi TNI tidak perlu diperdebatkan lagi. Menurut dia, ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk memberikan hak pilih dalam Pemilu pada aparat TNI. “Pertama, TNI itu sendiri, kedua rakyat, apakah rakyat mau TNI memilih kembali. Ketiga, Presiden, lalu kembalikan pada Undang-Undang nya. Purnomo juga menyatakan bahwa Undang-Undang Pemilu saat itu, tidak memungkinkan TNI ikut memilih dalam Pemilu karena TNI harus netral.<sup>40</sup>

Ide kembalinya hak pilih anggota TNI dilontarkan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Dalam salah satu acara di televisi swasta tahun 2016, ia berharap suatu saat nanti TNI memiliki hak politik yang sama dengan warga sipil. Meski tidak dalam waktu dekat, Gatot memperkirakan kesamaan hak itu akan terjadi dalam sepuluh tahun mendatang. Ide dari Gatot Nurmantyo ditepis oleh Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu tidak setuju jika Tentara Nasional Indonesia diberikan hak politik. Menurut Ryamizad, kondisi saat ini tidak pas bagi TNI untuk memiliki hak politik. “Kalau sekarang enggak pas ya, saya tidak mau TNI berpolitik karena kondisi kita kan belum matang berpolitik,” kata Ryamizad. Ryamizad mengatakan kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi TNI untuk memiliki hak politik. Bahkan 5-10 tahun ke depan pun, menurut dia, TNI belum bisa serta-merta berpolitik. Alasannya, dia khawatir akan terjadi perselisihan jika tentara diberikan hak politik.<sup>41</sup>

Pandangan senada dikemukakan oleh anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Supiadin Aries Saputra menolak anggota Tentara Nasional Indonesia kembali diberikan hak pilih dalam pemilihan umum. Menurut dia,

---

read/260862/endriantono-sepakat-prajurit-tni-punya-hak-pilih-pada-2014, diakses pada 29 September 2018.

<sup>40</sup> Pingit Aria, “Hak Pilih TNI Dinilai Tak Perlu Dibahas Lagi,” 10 Juli 2010, <https://nasional.tempo.co/read/260164/hak-pilih-tni-dinilai-tak-perlu-dibahas-lagi>, diakses pada 29 September 2018.

<sup>41</sup> Redaksi, “Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizad,” <https://nasional.tempo.co/read/811144/tak-setuju-tni-diberi-hak-politik-ini-alasan-ryamizad/full&view=ok>, diakses pada 29 September 2018.

hal itu berpotensi memecah belah soliditas TNI.<sup>42</sup> Supiadin menjelaskan, walaupun ada rencana untuk memberikan kembali hak pilih bagi anggota TNI, maka perlu kajian yang mendalam dan komprehensif. Menurut Supiadin, anggota TNI sebagai kekuatan bersenjata akan berbahaya bila diberi hak pilih dalam pemilu. Hak pilih TNI dapat diberikan bila demokrasi Indonesia sudah matang. Sedangkan saat ini dia merasa TNI masih rentan ditarik-tarik demi kepentingan politik. Hal ini berpotensi membuat anggota TNI tidak lagi solid.

## Penutup

Keterlibatan militer dalam pemilu-pemilu di Indonesia sudah ada sejak masa Orde Lama meskipun dalam bentuk dan derajat yang berbeda-beda. Pada masa Orde Lama keinginan militer dalam pemilu lebih sebagai upaya untuk mengontrol partai-partai politik yang ada secara politis. Pada masa ini, militer sempat membentuk IPKI meskipun hanya memperoleh suara kurang dari lima persen. Pendirian IPKI oleh militer pada dasarnya merupakan upaya militer untuk memberikan posisi tawarnya pada Presiden Soekarno saat itu hingga akhirnya militer diberikan kursi di parlemen.

Pada masa Orde Baru keterlibatan militer dalam pemilu-pemilu di Indonesia sesungguhnya hanya alat rezim untuk melindungi kekuasaannya lewat politik elektoral. Berbagai cara dilakukan militer untuk mengamankan kemenangan Golkar dalam pemilu selama masa kekuasaan Orde Baru, baik dari upaya melakukan intervensi terhadap partai politik hingga melakukan intimidasi dan kekerasan politik.

Pada pasca Orde Baru, keterlibatan militer dalam pemilu diperlihatkan dengan ketertarikan mereka terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, gubernur hingga presiden. Pada tingkat bupati/walikota atau gubernur biasanya yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah tersebut didominasi oleh perwira yang masih aktif yang lantas mengundurkan diri sebagai konsekuensi atas UU Pemilu yang ada.

---

<sup>42</sup> Redaksi, “Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral”, 4 Oktober 2016, <https://nasional.tempo.co/read/809444/panglima-usul-tentara-bisa-nyoblos-dpr-tni-harus-netral/full&view=ok>, diakses pada 9 Oktober 2018.

Sedangkan untuk pemilihan presiden, didominasi oleh kalangan purnawirawan.

Selain keterlibatan mereka dalam pemilihan bupati, gubernur dan presiden, kebanyakan pensiunan militer juga terlibat dalam berbagai tim sukses calon presiden. Pengalaman mereka di bidang intelijen dan jaringan yang dimiliki para purnawirawan saat menjabat sebagai perwira aktif diharapkan dapat membantu kandidat yang menjadi unggulannya memenangkan kontestasi pilpres.

Keterlibatan militer dalam pemilu apapun bentuknya, terutama bagi perwira aktif dikhawatirkan juga akan mereduksi reformasi internal yang saat ini sedang berjalan di lingkungan TNI. Pasca soeharto, TNI telah berupaya merumuskan paradigma baru. Salah satu substansi reformasi di tubuh TNI adalah fungsi sosial politik yang di zaman Orde Baru populer dengan sebutan dwi fungsi dan berkonsentrasi penuh pada fungsi pertahanan. Dengan demikian, konsekuensinya seluruh jajaran TNI baik institusi, satuan, maupun perorangan tak lagi melakukan kegiatan politik praktis ataupun menjadi partisan salah satu parpol. Sebagai rujukan, berdasarkan TAP MPR Nomor: VII/MPR/2000 ditetapkan, peran TNI sebagai alat pertahanan NKRI. Untuk mewujudkan perannya sebagai alat negara, kebijakan TNI dalam Pemilu seyogianya mendukung agar penyelenggaraan Pemilu dapat terlaksana secara lancar dan konstitusional

Sangat bisa dimaklumi, untuk mencapai tujuan politik, kontestan Pemilu baik untuk DPR, DPRD, DPD maupun calon presiden dan wapres akan sarat dengan persaingan. Terutama, dalam memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. TNI sebagai salah satu komponen bangsa yang masih mempunyai pengaruh cukup besar di kalangan masyarakat sangat mungkin dijadikan sasaran tarik-menarik kekuatan politik peserta Pemilu. Hal tersebut cukup beralasan mengingat TNI mempunyai organisasi yang terstruktur di seluruh penjuru tanah air.

Paling tidak ada dua hal yang rentan jika TNI kembali terlibat politik praktis. *Pertama*, karakteristik yang kental di tubuh TNI adalah satu komando (*unity of command*). Organisasi hirarkis yang sangat mengedepankan ketaatan pada atasan. Terbayang betapa bahayanya jika TNI

harus mendukung parpol yang jumlahnya puluhan atau kandidat capres dalam Pemilu. Fragmentasi kekuatan politik akan berpotensi menyeret mereka pada situasi ketidakpastian, terlebih di saat yang bersamaan tingkat kesejahteraan dan penguatan kelembagaan masih belum baik. *Kedua*, saat ini reformasi internal di tubuh TNI belum tuntas. Pusaran konflik politik dalam Pemilu akan mengancam proses yang sedang berjalan, sehingga dikhawatirkan semuanya akan kembali ke titik nol.

Demikian juga di kalangan purnawirawan TNI, keterlibatan mereka dalam pemilu entah sebagai calon kepala daerah, presiden maupun hanya sekedar tim pemenangan capres dan cawapres tanpa jeda waktu yang cukup panjang dikhawatirkan secara tidak langsung dalam menimbulkan friksi di kalangan internal militer.

Posisi yang berseberangan antar mantan komandan di kalangan militer akan menjadikan para prajurit dapat berdiri pada kegamangan dalam kegiatan dan proses pemilu yang sedang berlangsung mengingat dalam struktur organisasi mereka kendali komando, memegang peranan penting. Kendali komando ini secara psikologis seringkali tidak bisa hilang dalam jangka waktu yang pendek. Oleh karenanya ke depan, purnawirawan yang akan terlibat dalam pemilu maupun politik praktis lainnya paling sedikit ia telah melalui satu periode masa pemilu. Hal ini selain untuk memberikan jeda pada para purnawirawan tersebut terlibat politik praktis serta mengurangi keuntungan mereka menggunakan struktur komando yang pernah dimilikinya untuk memenangkan kontestasi politik, sekaligus juga memberikan kesempatan dan ruang kompetisi yang sama antara calon yang berasal dari militer dengan yang non militer.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku dan Jurnal**

- Bhakti, Ikrar Nusa. *Tentara Mendamba Mitra*. Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Crouch, Harold. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986.
- Diamond, Larry and Marc Plattner, eds., *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.

- Elisabeth, Adriana et al. *PDIP dan Prospek Pembangunan Politik*. Jakarta: Grassindo, 1991.
- Feith, Herbert and Lance Castles (editor), *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, Jakarta: Equinox Pub., 2007.
- Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Equinox Publishing –Asia Pte Ltd, 2007.
- Huntington, Samuel P. *The Third Wave of Democratization in The Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press, 1991.
- Karim, A. Gaffar. *Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 1995.
- Lev, Daniel S. *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959*, Jakarta: Equinox Publishing-Asia, 2009.
- Luckhman, Robin. “Democracy and Military: An Epitaph for Frankenstein’s Monster?” *Journal Democratization*, Vol. 3, No.2, (Summer 1996).
- Moertopo, Ali. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS, 1974.
- May, Brian. *The Indonesia Tragedy*, Singapore: Graham Brash, 1978.
- Nishihara, Masashi. *Golkar and the Indonesia Election of 1971*. New York: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1972.
- Nolte (ed.), *European Military Law Systems*. Berlin, 2003.
- Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia Since c.1200*. Stanford: Stanford University Press, 1991.
- Sundhaussen, Ulf. *The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945–1967*. Oxford University Press. 1982.
- Subekti, Valina Singka. *Partai Syarikat Islam Indonesia: Konstestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1994.

## Dokumen

- The Turkish Constitution, Art. 76
- Undang-undang Hungaria No. XCV tahun 2001.
- Tempo, “Ali Moertopo Telah Pergi”, Tempo, 28 Mei 1984.

## Sumber Online

- Fajar Pebrianto, “Begini Cerita Tragedi 27 Juli 1996 di PDIP yang Menyeret SBY,” 27 Juli 2018, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1110993/begini-cerita-tragedi-27-juli-1996-di-pdip-yang-menyeret-sby/full&view=okFajar> , diunduh pada 12 September 2018.
- Islahudin, “Pilkada 2018: 569 Pasangan calon terdaftar, 16 orang dari TNI/Polri,” dalam <https://beritagar.id/artikel/berita/569-pasangan-calon-terdaftar-16-orang-dari-tnipolri>, diunduh 12 September 2018.
- Dewi Nurita, “Beda Tim Purnawirawan TNI, Bravo 5 dan Cakra 19 di Tim Jokowi,” 20 Oktober 2018, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1138098/beda-tim-purnawirawan-tni-bravo-5-dan-cakra-19-di-kubu-jokowi/full&view=ok>, diunduh pada 29 Oktober 2018.
- Budiarti Utami Putri, “Daftar Purnawirawan Jenderal TNI di Kubu Prabowo – Sandiaga,” 19 Oktober 2018, dalam [https://nasional.tempo.co/read/1138033/daftar-purnawirawan-jenderal-tni-di-kubu-prabowo-sandiaga?page\\_num=3](https://nasional.tempo.co/read/1138033/daftar-purnawirawan-jenderal-tni-di-kubu-prabowo-sandiaga?page_num=3), diunduh pada 19 November 2018.
- Munawaroh, “Endriartono Sepakat Prajurit TNI Punya Hak Pilih Pada 2014,” 4 Juli 2010, dalam <https://nasional.te,mpo.co/read/260862/endriartono-sepakat-prajurit-tni-punya-hak-pilih-pada-2014>, diunduh pada 29 Septmber 2018.
- Pingit Aria, ”Hak Pilih TNI Dinilai Tak Perlu Dibahas Lagi”, 10 Juli 2010, dalam <https://nasional.tempo.co/read/260164/hak-pilih-tni-dinilai-tak-perlu-dibahas-lagi>, diunduh pada 29 September 2018.

## TENTANG PENULIS

### **Aisah Putri Budiatri**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui [aisahputrib@gmail.com](mailto:aisahputrib@gmail.com).

### **Agus Sutisna**

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Muhamadiyah Tangerang. Menyelesaikan pendidikan doctoral di Universitas Nasional, Jakarta. Saat ini penulis menjadi anggota KPU Provinsi Banten periode 2018-2023. Aktif menulis tentang kepemiluan dan demokrasi di berbagai jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: [tisna\\_1965@ymail.com](mailto:tisna_1965@ymail.com).

### **Firman Noor**

Penulis merupakan peneliti senior sekaligus professor riset pada Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia, S2 di Australian National University dan S3 di Universitas Exeter, Inggris. Karya-karya akademisnya banyak diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional maupun buku terkait kepemiluan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui Email: [firman.noor@yahoo.co.id](mailto:firman.noor@yahoo.co.id).

### **Idil Akbar**

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Padjajaran, Bandung. Menyelesaikan pendidikan master Ilmu Politik di FISIP Universitas

Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: [idil.akbar@gmail.com](mailto:idil.akbar@gmail.com)

### **Kurniawati Hastuti Dewi**

Penulis adalah peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2007 menyelesaikan program master dari Faculty of Asian Studies Australian National University dan mendapat gelar doktor dari Kyoto University Jepang tahun 2012. Memiliki passion dalam bidang gender dan politik, kepemimpinan perempuan, gender dan desentralisasi, hak-hak asasi perempuan dan anak serta gender, Islam dan demokrasi di Indonesia. Berbagai tulisan akademis telah diterbitkan dalam jurnal nasional, internasional dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: [kurniawati.dewi@yahoo.com](mailto:kurniawati.dewi@yahoo.com).

### **Lili Romli**

Penulis merupakan peneliti senior dan professor riset di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan doctoral ilmu politik di FISIP Universitas Indonesia. Kajian yang diminati penulis adalah tentang kepemiluan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui: email: [liliromli.lipi@gmail.com](mailto:liliromli.lipi@gmail.com)

### **M. Fajar Shodiq Ramadhan**

Penulis merupakan pengajar pada Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Airlangga, Surabaya. Beberapa karya tulisnya tentang kepemiluan telah dimuat dalam berbagai jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui email: [fajarramadhan@ub.ac.id](mailto:fajarramadhan@ub.ac.id).

### **Moch Nurhasim**

Adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas

Indonesia. Berbagai kajian seputar kepemiluan, partai politik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: [hasim\\_nur@yahoo.com](mailto:hasim_nur@yahoo.com).

### **Mouliza K.D Sweinstani**

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan kepemiluan. Penulis dapat dihubungi melalui email: [moulizadonna@gmail.com](mailto:moulizadonna@gmail.com).

### **Romel Masykuri**

Penulis merupakan mahasiswa program magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga. Dapat dihubungi melalui email: [romel.masykuri@gmail.com](mailto:romel.masykuri@gmail.com)

### **Ridho Imawan Hanafi**

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Menyelesaikan S1 Jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya. Melanjutkan S2 di Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia. Sebelum di LIPI, penulis bekerja sebagai peneliti di Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta (2008-2014). Kajian yang diminati adalah demokrasi, partai politik, dan pemilu. Penulis dapat dihubungi melalui surel [ridhoimawan@gmail.com](mailto:ridhoimawan@gmail.com).

### **Sri Budi Eko Wardani**

Penulis adalah pengajar di departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Pernah menjadi Direktur Eksekutif Puskapol UI. Kajian peminatan penulis adalah tentang kepemiluan, perempuan dan perwakilan politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: [sbe\\_wardani@yahoo.com](mailto:sbe_wardani@yahoo.com).

### **Sri Yanuarti**

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia*, *Tentara yang Gelisah*, *Tentara Mendamba Mitra*, *Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru*, *Beranda Perdamaian*, *Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua)*, *Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan*, *Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004*, dan *Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Kajian kepolisian di antaranya: *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*; *Evaluasi Reformasi Polri dan lain- lain*. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis kajian tentang konflik antara lain: *Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang*, *Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku*; *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*; *Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia*, dan lain-lain. Ia dapat dihubungi melalui surel [yanuc2000@yahoo.com](mailto:yanuc2000@yahoo.com).

# Informasi Hasil Penelitian Terpilih

